

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh Indonesia adalah pesatnya peningkatan jumlah angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2017 mencapai 121,87 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1,41% (1,7 juta jiwa) dibandingkan keadaan pada Agustus 2016. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan penawaran tenaga kerja di dalam pasar bertambah, namun penawaran tenaga kerja yang bertambah tidak selalu diiringi dengan permintaan tenaga kerja yang mampu menyerap angkatan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,94% (7,24 juta jiwa).

Keadaan pasar tenaga kerja di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia mencapai 252,7 juta jiwa, dimana 48,23% (121,9 juta jiwa) diantaranya menjadi bagian dari angkatan kerja. Jumlah lapangan kerja meningkat sebesar 1,7% dari bulan Agustus 2016 hingga Agustus 2017, angkatan kerja meningkat sebesar 1,4%, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sebesar 0,47% pada periode yang sama. Meskipun TPT mengalami

penurunan, namun penurunan nilai TPT tersebut masih kecil dibandingkan peningkatan angkatan kerja di Indonesia (ILO, 2015).

Pembangunan Ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu panjang. Definisi ini mengandung tiga unsur, (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu proses perubahan yang terus menerus yang ada di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri unsur investasi baru; (2) usaha meningkatkan pendapatan per kapita; (3) kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang (Suryana, 2000).

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam: Pertama, perubahan struktur ekonomi: dari pertanian menuju industri atau jasa. Kedua, perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. Potensi ekonomi suatu daerah menggambarkan sejauhmana berbagai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki suatu daerah memiliki kekuatan dalam memberikan kontribusi produktif terhadap pembangunan ekonomi. Sumber daya alam (SDA) meliputi pertanian, perikanan/kelautan, dan pertambangan. Sedangkan potensi sumber daya manusia (SDM), selain dalam jumlah penduduk juga jumlah pekerja.

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga belum dapat dijadikan indikasi kondisi ketenagakerjaan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan seseorang akan tetap berusaha bekerja agar dapat memenuhi

kebutuhannya, sehingga tingkat pengangguran terbuka terlihat kecil. Permasalahannya adalah mereka yang terlihat bekerja tetapi tidak optimal atau tidak penuh, seperti jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, produktivitas rendah, upah rendah dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian atau sering disebut dengan pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh terdiri dari setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Pekerja tidak penuh di Indonesia dalam kurun waktu 2013-2016 cenderung mengalami kenaikan. Persentase pekerja tidak penuh terhadap jumlah penduduk yang bekerja berturut-turut dari tahun 2013-2016 sebesar 19,18%, 33,94%, 33,67% dan 39,50%, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 9,96% dari periode sebelumnya (macroeconomic.feb.ugm.ac.id).

Keadaan pasar tenaga kerja di Indonesia juga hampir sama terjadi di Pulau Jawa, meskipun dengan proporsi yang berbeda. Hingga saat ini Pulau Jawa masih menjadi pulau yang memiliki jumlah angkatan kerja tertinggi di Indonesia. Angkatan kerja di Pulau Jawa tahun 2017 mencapai 71,1 juta jiwa atau sekitar 58% dari seluruh angkatan kerja di Indonesia. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih tergolong tinggi, bahkan tiga diantaranya menjadi Provinsi dengan TPT tertinggi di Indonesia tahun 2013 dan 2014, yaitu Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat (bisnis.com). Selain masih tingginya tingkat pengangguran, angka pekerja tidak penuh di Pulau Jawa juga masih tinggi. Pada Agustus 2017, persentase pekerja tidak penuh mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta berturut-turut

sebesar 20,4%, 10,70%, 24,99%, 29,59%, 35,36% dan 1,17% (Badan Pusat Statistik, 2017). Hal ini menunjukkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di Pulau Jawa masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan dari pemerintah guna mengatasi hal tersebut terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Pengangguran merupakan masalah terbesar bagi suatu negara, karena pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat rendah yang pada akhirnya akan menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lain. Negara berkembang seringkali dihadapkan pada besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah usia kerja. Menurut Limongan (Ningrum, 2008), Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal investasi, banyaknya angkatan kerja, dan masalah sosial politik di negara tersebut. Sedangkan bagi negara maju masalah pengangguran berkaitan dengan pasang surutnya siklus bisnis.

Kesempatan kerja itu timbul karena adanya investasi dan usaha untuk memperluas kesempatan kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan investasi, laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Strategi pembangunan yang diterapkan juga akan mempengaruhi usaha perluasan kesempatan kerja. Strategi pembangunan dan sarana tujuan nasional harus benar-benar memperhatikan aspek sumber daya manusia dalam memasuki lapangan kerja, orientasi untuk meningkatkan GDP (*Gross National Product*) harus diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan kesehatan, dan keterampilan yang memadai agar dalam

pembangunan tersebut peningkatan GDP juga diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja.

Pelaksanaan otonomi daerah yang saat ini berjalan di Indonesia menjadikan perubahan pada tata kelola pemerintahan di daerah, pengelolaan yang semula dikendalikan terpusat oleh pemerintah pusat sekarang pemerintah daerah mempunyai peran yang lebih banyak untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat dengan prinsip-prinsip seperti keterbukaan, partisipasi masyarakat serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dasar dari pemberian otonomi daerah adalah dengan pertimbangan daerah lebih mengetahui masalah serta kebutuhan yang dihadapi masyarakat di daerah itu sendiri. Mengacu dasar dan pertimbangan pemberian otonomi daerah, diharapkan nantinya akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inti pelaksanaan otonomi adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya (Yuliadi, 2007).

Sejalan dengan dilaksanakannya otonomi daerah, pemerintah pusat juga telah mengatur pembagian sumber pembiayaan kepada daerah untuk melaksanakan tugas serta kewajiban yang dilimpahkan. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU NO.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang mengatur

bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan membiayai kebutuhannya guna melaksanakan pembangunan. Pada pasal 2 tentang prinsip kebijakan perimbangan keuangan, dijelaskan bahwa pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dalam hal ini dana perimbangan berasal dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah (Yuliadi, 2007).

Perkembangan industri di Indonesia memberikan berbagai dampak kepada daerah yang memiliki banyak perindustrian. Peningkatan jumlah industri juga akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat sekitar karena akan menyerap banyak tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja selain mengurangi tingkat pengangguran juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu. Adanya industri juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sehingga pendapatan asli daerah otomatis akan meningkat dan nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik. Menurut Riduansyah (2003), secara tidak langsung sektor industri akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan daerah. Penerimaan pajak bumi dan bangunan akan diperoleh daerah dari pembangunan pabrik-pabrik di daerah. Selain pajak, berbagai retribusi yang dapat ditarik dari industri juga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Pekembangan industri di daerah selain memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah ternyata juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Adanya industri akan berpotensi menimbulkan kerusakan

lingkungan sekitar akibat limbah yang timbul dari proses pengolahan yang dilakukan sektor industri. Pemerintah harus bersikap tegas kepada industri yang tidak melakukan manajemen pengelolaan limbah yang baik kepada industri-industri yang ada di daerah guna mengurangi kerusakan yang akan timbul akibat kegiatan industri. Namun secara umum perkembangan perindustrian di daerah akan memberikan dampak yang positif dari segi ekonomi kepada daerah baik kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh BPS, dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2017 jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta yang telah bekerja mengalami penurunan. Pada tahun 2011 terdapat 16.304.058 angkatan kerja dan 2.580.789 pencari kerja. Pada tahun 2012 angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 5,15% menjadi 15.463.658 sedangkan pencari kerja menurun 10% sejumlah 1.227.308. pada tahun 2013-2015 angkatan kerja menurun secara konstan sebanyak 2,4%, sedangkan untuk pencari kerja mengalami penurunan konstan sebanyak 4%. Adanya penurunan jumlah pencari, namun pada tahun 2016 jumlah pengangguran di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan di wilayah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan usaha yang

dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Namun banyak kendala yang dihadapi untuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah Keresidenan Surakarta baik sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sektor industri merupakan sektor penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang paling tinggi di wilayah Kabupaten/Kota Eks Keresidenan Surakarta. Sektor industri menyumbang terhadap total PDRB wilayah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta berkisar 33% lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya pada tahun 2017.

Di era reformasi sekarang ini, pengelolaan keuangan di berbagai daerah dituntut agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sejak diberlakukannya transformasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Dengan begitu Pemerintah Daerah dapat dengan mudah mengembangkan daerah masing-masing dan juga dalam hal pengeluaran untuk belanja yang dianggar dalam APBD.

Belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu unsur belanja langsung. Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. Selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya rutin, biaya operasional dan pemeliharaannya. Belanja modal terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, salah satu dari 11

(sebelas) prioritas pembangunan nasional tersebut adalah Infrastruktur. Infrastruktur diprioritaskan dalam penganggaran belanja modal, setelah dikurangi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja wajib.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai suatu daftar yang memuat tentang sumber-sumber penerimaan dan pos-pos belanja atau biaya dari pemerintah daerah untuk jangka waktu satu tahun anggaran. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat pos belanja daerah yang terbagi atas dua pengklasifikasian belanja menurut kelompok belanja yaitu: (1) Belanja Tidak Langsung dan (2) Belanja Langsung. Salah satu belanja yang termasuk belanja langsung yaitu honorarium/upah.

Fenomena yang terjadi di dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Kementerian Keuangan mencatat adanya fenomena tidak sehat dalam keuangan pemerintah daerah, mayoritas daerah terlalu mengandalkan dana transfer pemerintah pusat untuk membiayai operasional birokrasi. Dalam struktur APBD di banyak daerah, banyak yang tergantung transfer pemerintah pusat, bisa sampai 80%. Situasi itu juga semakin memburuk lantaran terjadi pemekaran wilayah.

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (2014) total nilai investasi penanaman modal asing (PMA) terus menguat terutama di sektor industri dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2011, investasi PMA senilai US\$3,3 miliar atau sekitar 20 persen. Namun pada 2017, nilai investasi PMA

meningkat menjadi US\$16,6 miliar, naik lima kali lipat dari total investasi di Indonesia. Dengan adanya peningkatan investasi pada suatu industri, juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Adanya peningkatan jumlah perusahaan akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Mayza, 2015)

Proses pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dalam proses tersebut, sektor industri dijadikan prioritas pembangunan yang diharapkan mempunyai peranan penting sebagai sektor pemimpin (*leading sector*), yang berarti dengan adanya pembangunan industri akan memacu dan mengangkat sektor-sektor lainnya seperti sektor jasa dan sektor pertanian. Pembangunan ekonomi yang mengarah pada industrialisasi dapat dijadikan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan juga dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk untuk memenuhi lapangan pekerjaan bagi penduduk untuk memenuhi pasar tenaga kerja (Simanjuntak, 2002).

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dipengaruhi oleh besarnya investasi di daerah. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi (Sjafii, 2009). Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja. Melalui investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan yang

kemudian akan mampu untuk meningkatkan output dan pada akhirnya juga meningkatkan pendapatan. Dengan semakin banyaknya investasi yang masuk, dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penduduk serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Dengan adanya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang masuk di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten/Kota Eks Keresidenan Surakarta. Para investor yang menanamkan modalnya baik investor dalam negeri maupun asing dapat membantu menurunkan angka pengangguran dengan cara membangun proyek atau perusahaan sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta.

Faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi (Feriyanto, 2014).

Selain investasi dan jumlah PDRB, permintaan akan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat upah. Selama ini masalah upah sering timbul karena adanya perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja. Sehingga dalam hal ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut. Adanya peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan barang dan jasa yang mendorong perusahaan untuk berkembang.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum menjadi alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang padat modal. Upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi industri. Berdasarkan teorinya, upah yang tinggi akan membuat biaya produksi industri juga meningkat, akibatnya, harga suatu produk juga meningkat. Peningkatan harga produk suatu barang menurunkan permintaan akan barang tersebut. Kondisi ini akan memaksa produsen untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan, yang pada selanjutnya juga dapat mengurangi permintaan akan tenaga kerja (Sumarsono, 2009).

Penyerapan tenaga kerja juga tidak lepas dari peranan pemerintah sebagai penyusun kebijakan untuk mendukung investasi yang baik, standar pendapatan untuk kesejahteraan tenaga kerja dan strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum menjadi alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang padat modal.

Penanaman modal di suatu daerah akan memacu pemanfaatan sumber daya alam di daerah. Adanya investasi yang masuk akan meningkatkan perekonomian daerah sebab akan memacu sektor-sektor ekonomi daerah. Dampak yang akan terjadi adalah penyerapan tenaga kerja berpotensi meningkat sehingga mampu menekan peningkatan jumlah pengangguran. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kerja, karena manusia adalah makhluk pekerja (*homo faber*), oleh karena itu sudah pasti Islam memiliki norma-norma, petunjuk-petunjuk serta inspirasi-inspirasi yang berkaitan dengan kerja. Menurut Yusuf Qardhawi pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ.

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm: 39)

Ayat ini memperjelas bahwa manusia akan hanya memperoleh apa yang dikerjakannya, artinya jika ingin kehidupan yang baik manusia harus bekerja, baik untuk kehidupan di dunia, maupun di akhirat.

Investasi sektor industri yang semakin meningkat di Kabupaten/Kota Eks Keresidenan Surakarta tentu akan memajukan sektor industri. Namun, hal tersebut masih menunjukkan tingginya jumlah angkatan kerja yang berimbas semakin banyaknya pengangguran. Peningkatan jumlah angkatan kerja dimungkinkan terjadi karena kebijakan pengupahan belum berorientasi kepada kepentingan seluruh pihak. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh PDRB, Upah, Jumlah**

Industri, Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Karesidenan Eks-Surakarta Periode Tahun 2011-2017”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Objek penelitian yang dipilih adalah penyerapan tenaga kerja Karesidenan Eks-Surakarta Periode Tahun 2011-2017.
2. Upah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data upah minimum kota/kabupaten di provinsi Jawa Tengah.
3. Variabel jumlah industri dalam penelitian ini menggunakan data sektor industri besar di Kabupaten/Kota Eks-Keresidenan Surakarta dengan menggunakan data dari BPS Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta dan BPS Provinsi Jawa Tengah.
4. Variabel penanaman modal asing dalam penelitian ini menggunakan data pada sektor industri besar dengan menggunakan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Eks-Surakarta periode tahun 2011-2017?

2. Bagaimana pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Eks-Surakarta periode tahun 2011-2017?
3. Bagaimana pengaruh jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Eks-Surakarta periode tahun 2011-2017?
4. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Eks-Surakarta periode tahun 2011-2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Eks-Surakarta periode tahun 2011-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Eks-Surakarta periode tahun 2011-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Eks-Surakarta periode tahun 2011-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap penyerapan tenaga kerja di Karesidenan Eks-Surakarta periode tahun 2011-2017.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik secara praktis maupun teoretis. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Daerah di Keresidenan Eks-Surakarta, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan perkembangan pembangunan sektor industri.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang pengetahuan pelaksanaan pembangunan di Karesidenan Eks-Surakarta, khususnya pembangunan sektor industri.
- b. Untuk menambah koleksi dan pengetahuan mahasiswa lain, serta sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.
- c. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang didapatkan dalam bangku kuliah dan membandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.